



KECAMATAN WOTU

# LAPORAN KINERJA

Triwulan II Tahun Anggaran 2025



Jalan A. Pandangai No. 1, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,  
Sulawesi Selatan.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Triwulan II. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Wotu, 07 Juli 2025

Camat Wotu,



**ASIS DAWI, S.Sos.,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19700908 200312 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	2
1.4 Sumber Daya Aparatur .....	7
1.5. Isu Strategis .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Strategis .....	12
2.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah .....	12
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	13
2.4. Perjanjian Kinerja .....	17
2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025 .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	26
3.2.1. Capaian Sasaran Strategis I .....	27
3.2.2. Capaian Sasaran Strategis II .....	50
3.3. Realisasi Anggaran .....	61
3.4. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi .....	77
BAB IV PENUTUP .....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Melalui laporan kinerja ini, dapat diketahui sejauh mana capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja program yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan II yaitu yaitu April-Juni 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi tindak lanjut pada triwulan berikutnya.

Dengan adanya laporan kinerja ini, diharapkan Kantor Kecamatan Wotu mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi antar bidang, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama 1 (satu) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini juga menjadi alat kendali untuk menganalisis capaian setiap program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur :

1. **Camat;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
2. **Sekretaris Camat;** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
    - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
    - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Sekretaris camat** membawahi beberapa bagian dan seksi antara lain :

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huru b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

- 2) Subbagian Umum dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

**Kepala Subbagian Umum dan Keuangan** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuan dengan tugas dan fungsinya.

- 3. Seksi Pemerintahan Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas** pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

**Kepala seksi pemerintahan umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebagaimana dimaksud dalam pasl 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai **tugaspokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

**Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :

- a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
- c. Pembinaan dan pelasanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

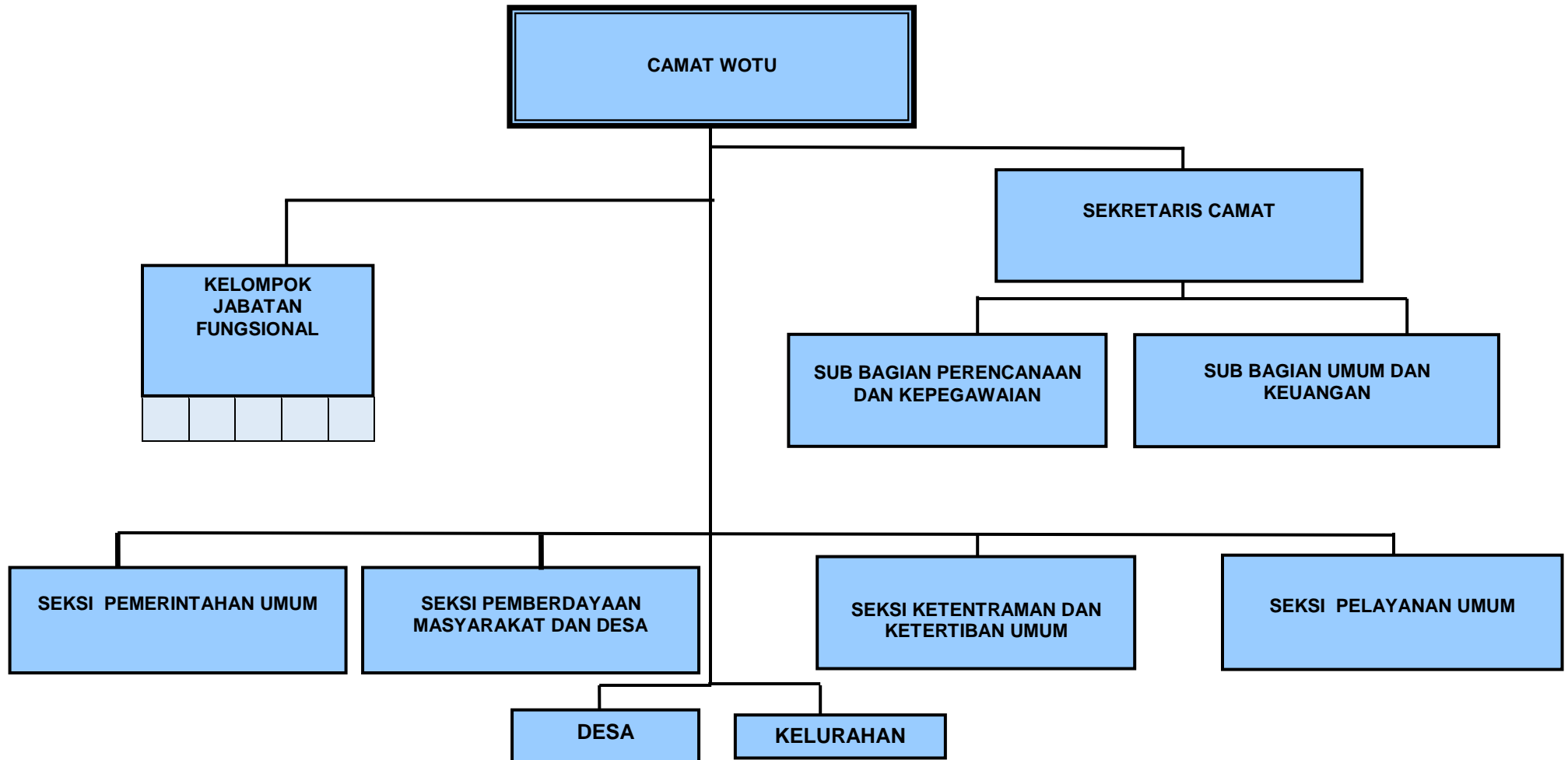
- 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Kepala seksi pelayanan umum,** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Wotu**



Sumber: Peraturan Bupati No 56 Tahun 2016

#### 1.4 Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Wotu secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Wotu dan Kantor Kelurahan Wotu adalah 25 (Dua Puluh Lima) orang ASN dan 4 (Empat) orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data Kepegawaian, jumlah pegawai negeri sipil Kecamatan Wotu pada tahun 2025 Sebanyak 19 Orang, yang tersebar dalam Empat golongan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	2	5	1	3	11
3	Golongan II	-	-	2	4	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		3	6	3	7	19

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

##### 2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SMA/SMP hingga Strata 2 (S2). Komposisi tingkat pendidikan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Rincian jumlah ASN menurut golongan dan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan**

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	2	-	-	-	2

2	Golongan III	-	9	-	2	11
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		2	9		8	19

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

### 3. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Wotu terdiri dari jabatan struktural. Pembagian ini mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaran jumlah ASN menurut jabatan dan eselon disajikan pada Tabel 1.3 berikut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN menduduki jabatan struktural, khususnya pada eselon IV A/B dan non eselon.

**Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Eselon				Jumlah
		II/A	III A/B	IV A/B	Non Eselon	
1	Struktural	0	2	6	11	19
JUMLAH						19

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

### 4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja ini terdiri atas Dua kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga dengan status upah jasa. Komposisi ini menggambarkan keberagaman status kepegawaian yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu. Rincian jumlah ASN menurut status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

**Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian**

STATUS KEPEGAWAIN		JUMLAH
1	PNS	19
2	UPAH JASA	4

JUMLAH	23
--------	----

Sumber : Kecamatan Wotu.

## 5. Sarana Prasarana

Adapun pada sarana prasarana Kecamatan Wotu memiliki sebuah gedung diatas lahan tanah seluas 3.745 M<sup>2</sup>. Rumah Jabatan Camat dibangun diatas lahan tanah seluas 1.295 M<sup>2</sup>. Serta berdasarkan Laporan Inventarisasi Asset OPD Kecamatan Wotu , sarana prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2024 antara lain :

**Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	<b>Kecamatan :</b>		
1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3.	Gedung Serba Guna	1 Unit	Baik
4.	Tanah Kantor Camat	3,745 M <sup>2</sup>	Baik
5.	Tanah Bangunan Rujab	1,295 M <sup>2</sup>	Baik
6.	Mobil Operasional Camat	1 Unit	Baik
7.	Sepeda Motor	5 Unit	Baik
8.	Meja Rapat	5 Buah	1 Kurang Baik
9.	Meja Kerja b1/2 biro	11 Buah	Baik
10.	Kursi Kerja Putar	13 Buah	10 Baik, 3 Rusak
11.	Kursi Rapat	145 Buah	Baik
12.	Kursi Tamu	4 Buah	Baik
13.	AC ½ PK	3 Unit	Baik
14.	Lemari Arsip Kayu	2 Buah	Baik
15.	Komputer / PC	5 Buah	4 Baik, 1 Rusak
16.	Printer	6 Buah	5 Baik, 1 Rusak
17.	Lemari Filling Kabinet	5 Buah	Baik
18.	Laptop	5 Buah	Baik
19.	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
20.	Mic	1 Set	Baik

21	Mesin Rumput Potong Gendong	2 Buah	1 Baik , 1 Rusak
22	Dispenser	2 Buah	Baik
23	Lori-Lori	2 Buah	Baik
24	Pompa Tangan	2 Buah	Baik
25	Bangku Tunggu Besi	3 Buah	Baik
26	Kipas Angin	4 Buah	Baik
27	Layar Proyektor	1 Buah	Baik
28	Sound System	2 Set	Baik
29	Genset	1 Buah	Baik

*Sumber data : Kecamatan Wotu*

### 1.5. Isu Strategis

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Wotu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Wotu juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Wotu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih minim.
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal.
4. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.

5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Renstra (Rencana Strategis) Kantor Kecamatan Wotu disusun berpedoman pada Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Wotu sebagai Perangkat Daerah di Luwu Timur. Kemudian berdasarkan Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahunan Kecamatan Wotu.

Dalam upaya Mewujudkan Visi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu **“Luwu Timur Berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”** maka Kantor Kecamatan Wotu Melaksanakan Misi Ke-4 dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”** sebagai amanat bagi kantor Kecamatan Wotu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### 2.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah yang jelas akan memberikan Perangkat Daerah Arah Kerja yang lebih terukur, mampu menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**Tujuan perangkat** daerah merupakan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah (lima tahun), sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, berikut disajikan Tujuan Kecamatan Wotu :

***“Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu”***



Sementara itu, **sasaran perangkat daerah** adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari Kecamatan Wotu adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu.
2. Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu.

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan perangkat daerah untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU bersifat spesifik, terukur, relevan, dan menjadi tolak ukur utama yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berjalan efektif. Tanpa IKU, tujuan pembangunan hanya bersifat normatif dan sulit diukur pencapaiannya.

Dasar hukum penyusunan IKU tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP** dan **PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014**, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah merumuskan indikator kinerja utama sebagai bagian dari manajemen kinerja. Dengan demikian, IKU bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga pondasi penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat Matriks hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kecamatan Wotu dalam Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wotu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang sesuai antara harapan dan kebutuhan.</li> <li>Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan kategori : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak baik dengan nilai presepsi 1</li> <li>Kurang baik dengan nilai presepsi 2</li> <li>Baik dengan nilai presepsi 3</li> <li>Sangat baik dengan nilai presepsi 4</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (rumah sakit) dengan pengisian kuesioner.</li> <li>Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan rumah sakit</li> <li>Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang</li> </ul>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	WUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644-3,532	76,63-86,30	B	BAIK
4	3,5324-4,00	86,33-100,00	A	SANGAT BAIK

			$\text{Nilai Perunsur} = \frac{\text{Jumlah Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{Bobot Nilai Penimbang} = \frac{1}{\text{Total Unsur}}$ $\text{Nilai Persepsi Tertimbang:} = \text{Total Nilai Perunsur} \times \text{Nilai Penimbng}$ $\text{IKM} = \text{Total Nila Persepsi Tertimbang} \times 25$	<p>masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya</p>		
2	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai AKIP adalah data dan informasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas</li> </ul>	Tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara	LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Camat

	urusan pemerintahan kecamatan Wotu		<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Hasil pengukuran dari Nilai AKIP di Konversi menjadi 6 Kategori yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat memuaskan (AA)= 90-100</li> <li>• Memuaskan (A)= 81-89</li> <li>• Sangat Baik (BB)= 70-79</li> <li>• Baik (B)= 60-69</li> <li>• Cukup (CC)= 50-59</li> <li>• Kurang (C)= 40-49</li> <li>• Sangat Kurang (D)= 1-30</li> <li>• E= 0</li> </ul> </li> <li>• Formulasi:  <math>\text{Nilai AKIP} = (0,30 \times \text{Nilai Perencanaan}) + (0,30 \times \text{Nilai Pengukuran}) + (0,15 \times \text{Nilai Pelaporan}) + (0,25 \times \text{Nilai Evaluasi Internal}) +</math> </li> </ul>	<p>kuantitatif terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui instrumen evaluasi AKIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melalui penyusunan Nilai AKIP yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja organisasi.</li> </ul>		
--	------------------------------------	--	---	---	--	--

Tabel 2.2

## Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Dan Target Kecamatan Wotu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Transisi 2021	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Tingkat Pertumbuhan IKM	2	2	2,56	2,5	1,21	2,40	2,40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	78	80	82	85	85	85
	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai LAKIP Kecamatan Wotu	50,63	73	77	81	82	82	82

Sumber: Kecamatan Wotu

**2.4. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara Atasan dan bawahan untuk melaksanakan program, kegiatan, serta target kinerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak kinerja yang menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keberadaan perjanjian kinerja sangat penting dalam perencanaan karena memberikan arah yang jelas, menjadi dasar penyusunan strategi dan pengelolaan sumber daya, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga hasil pembangunan dapat diukur secara obyektif dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA (Rencana Strategis) 2021-2026, RENJA (Rencana Kerja) 2025, IKU dan

APBD 2025, dimana Kecamatan Wotu akan melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan.

Untuk dapat mengukur Keberhasilan implementasi dari rencana startegis Tahun 2025, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan target untuk masing masing Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Wotu Tahun 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai LAKIP Kecamatan Wotu	82

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Penetapan Kinerja dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wotu Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp. 2.949.577.075 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.932.577.075 dan belanja modal sebesar Rp. 17.000.000. Secara lengkap anggaran pada program Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3 Program dan Anggaran**

No	Program	Anggaran	Kegiatan
1	Program Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.841.842.675	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp6.019.500	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp62.231.750	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp9.175.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp25.248.500	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp5.059.650	APBD

## 2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Wotu Tahun 2025

Rencana anggaran merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Rencana anggaran disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan benar-benar sejalan dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Agar target tersebut dapat direalisasikan secara efektif, diperlukan dukungan sumber daya, terutama berupa anggaran yang memadai dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta dituangkan dalam APBD. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian anggaran tersebut dirincikan berdasarkan Program, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran**

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.320.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4.320.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Laporan	4.320.000



	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>40.231.750</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>40.231.750</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.512.950
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 Laporan	28.718.800
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>7.375.000</b>
	<b>Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4.600.000</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.625.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	1 Laporan	1.975.000
	<b>Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.775.000</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2.775.000
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>14.803.500</b>
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14.803.500</b>

	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	3 Dokumen	14.803.500
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>3.809.650</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>3.809.650</b>
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	2.484.850
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	1.324.800
<b>Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wotu</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.970.662.344</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20.841.500</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	9.075.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	524.950
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	2.724.850
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	8.516.700
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.612.560.994</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.599.610.994

	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	12.950.000
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.790.000</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	5.790.000
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14.349.850</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	2.681.850
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	11.668.000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>138.785.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	2.125.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	4.560.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	2.100.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	95.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	30.000.000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>17.000.000</b>
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	17.000.000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>130.635.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	7.130.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	22.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	5.025.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	96.480.000
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>30.700.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	13.950.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	6.750.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>2.041.202.244</b>

Sumber: Kecamatan Wotu

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Prinsip ini menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan sehingga setiap penggunaan sumber daya negara dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui instrumen perencanaan dan pelaporan. Maka dari itu Kecamatan Wotu selaku Instansi Pemerintah yang melayani Masyarakat Melakukan Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Wotu triwulan II memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2025.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan Kecamatan Wotu.

Setiap indikator mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Data capaian diperoleh dari laporan kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, serta sumber data pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengukuran capaian kinerja ini, Kecamatan Wotu dapat menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Tingkat capaian Kinerja Kecamatan Wotu di peroleh dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi di ukur dari setiap Komponen yang ada dengan Kategori Sebagai Berikut:

**Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

No	Nilai Angka	Predikat	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan – kinerja melampaui target, efektif, efisien, dan inovatif
2	>80-90	A	Memuaskan – kinerja mencapai target dengan efektivitas dan efisiensi baik
3	>70-80	BB	Baik – sebagian besar target tercapai, masih ada ruang perbaikan
4	>50-60	B	Cukup – target tercapai secara minimal, efektivitas dan efisiensi terbatas
5	>30-50	C	Kurang – sebagian besar target tidak tercapai, kinerja belum optimal
6	0-30	D	Sangat Kurang – kinerja jauh di bawah target, tidak efektif dan tidak efisien

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara target dan realisasi, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun hambatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Wotu Pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	81,32	95,67	Belum Mencapai Target
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wotu	Nilai LAKIP Kecamatan Wotu	82	61,10	74,51	Belum Mencapai Target

Sumber:Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

### 3.2 . Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025, selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Wotu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Melalui analisis capaian kinerja ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wotu dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, guna memastikan target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.



### 3.2.1. Capaian Sasaran Strategis I

#### **“Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu”**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi ke-4 Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ **Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**” dengan Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”. Sasaran ini didukung oleh kantor kecamatan Wotu Sebagai *Leading Sector* pada instansi pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Adapaun Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian Sasaran Strategis I Kecamatan Wotu ini adalah **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Pengukuran penilaian IKM diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Wotu. Kemudian hasil dari responden ini di proses menggunakan Formula sebagai berikut:

$$IKP = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Parameter}}{\text{Total Parameter yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$IKM = \text{Total Seluruh IKP} \times 25$$

Dimana:

$$\text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{\text{jumlah Parameter}}$$

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Penilaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor Kecamatan Wotu. Instrumen kuesioner ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus menjadi umpan balik (*feedback*) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari **150 responden**, diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Wotu sebagaimana diuraikan pada data berikut.

**Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	81,32	95,67%

*Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025*

Berdasarkan tabel 3.2, Target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 85 dan terealisasi pada Triwulan II Senilai 81,32 dengan tingkat persentase 95,67% dari target yang direncanakan. Realisasi ini termasuk Predikat A (Memuaskan).

## **2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	78	90,65	116,22%
		2023	80	78,25	97,81%
		2024	82	78,6	95,85%
		2025	85	81,32	95,67%

*Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa Pada tahun 2022 Realisasi capaian Nilai IKM itu sebesar 90,65 dan pada tahun 2023-2024 Mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga Angka 78, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dan Rasionalisasi Metode Perhitungan Nilai IKM. Namun Pada Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Wotu sudah berhasil meningkatkan Kinerja Pelayanannya hingga di Peroleh Nilai IKM Sebesar 81.32 meskipun belum sepenuhnya mencapai Target. Oleh karena itu

kecamatan Wotu akan terus melakukan Evaluasi dan Perbaikan hingga bisa melampaui target yang ditetapkan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	81,32	85

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi pada triwulan II Tahun 2025 adalah **81.32** dengan Predikat **“Memuaskan”**. Target Nilai IKM Pada akhir Periode Renstra 2021-2026 adalah 85. Jika Nilai IKM Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan Target akhir Renstra, maka Persentase capaiannya sebesar 95.67%. Realisasi ini sudah sangat menghampiri target. Untuk itu diharapkan upaya yang lebih maksimal dari Aparat Kantor Kecamatan Wotu untuk meningkatkan semua potensi yang mendukung tercapainya target indikator tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui bimtek dan Menyiapkan sarana dan prasarana.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

##### a. Faktor penyebab keberhasilan

- 1) **Banyaknya program dan kegiatan yang bersifat objektif** terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum
- 2) **Peran aktif Kepala Seksi** dalam pelayanan yang optimal dapat mewujudkan tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
- 3) **Tingginya komitmen aparatur kecamatan** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 4) **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pelayanan administrasi, yang meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.

##### b. Faktor Penyebab Kegagalan

- 1) **Keterbatasan sumber daya manusia**, terutama pada kegiatan yang membutuhkan tenaga teknis atau administrasi tambahan.
- 2) Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan sudah optimal namun **indikator kinerja utama sasaran kurang menjadi perhatian** yaitu penilaian melalui kuesioner. Pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan melalui pengisian kuesioner bukan menjadi standar operational prosedur (SOP) setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 3) **Standar operational prosedur (SOP) belum dilakukan perbaikan dan revisi** akibat perubahan peraturan mendasar terhadap setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

##### c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- 1) Kantor Kecamatan Wotu melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung terhadap upaya mewujudkan sasaran Kantor Kecamatan Wotu agar tercapai.
- 2) Menggunakan standar operasional prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Wotu.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 (Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan) terdiri dari 5 program, 6 Kegiatan, dan 9 Subkegiatan. Dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 70.539.900 dengan realisasi sebesar Rp 40.955.950 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 58,06%.

**Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MENINGKATNYA KEMPAMPUAN PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	81,32	95,67%	Rp. 70.539.900	Rp.40.955.950	58,06%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100%	50%	50%	Rp. 4.320.000	Rp.930.000	21,53%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	75%	75%	Rp. 40.231.750	Rp. 24.157.950	60,05%

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	50%	50%	Rp.7.375.000	Rp. 3.668.000	49,73
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	50%	50%	Rp.14.803.500	Rp. 12.200.000	82.41%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100%	0%	0%	Rp.3.809.650	Rp. 0	0%

Sumber:Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Wotu sebesar 95,67% dengan Penyerapan anggaran sebesar 58,06%, **sehingga persentase efesiensi biaya adalah 41,94%** . Persentase Efesiensi ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efesiensi Biaya} = 100\% - \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaua}} \times 100\% \right)$$

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

### a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan untuk mendukung efektivitas tugas Camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh **Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan**, yang meliputi tiga

bidang utama. Pertama, **pengelolaan layanan PPID Kecamatan**, yang memastikan tersedianya informasi publik secara transparan melalui pengelolaan Daftar Informasi Publik, pelayanan permohonan informasi, dan penyampaian laporan PPID kepada PPID Utama. Kedua, **pelayanan administrasi pemerintahan**, yang mencakup penerbitan berbagai surat keterangan, verifikasi dokumen pelayanan, serta fasilitasi administrasi kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Ketiga, **monitoring dan evaluasi retribusi desa**, yang dilakukan untuk memastikan tertib administrasi, ketepatan pelaporan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan retribusi di desa.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah meningkatnya capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **50%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{50}{100} \right) \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan



1 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

**Tabel 3.7 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	50%	50%
2.1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	50%	50%
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lap	6 Lap	50%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

**Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan  
Dan Pelayanan Publik**

---



Monitoring dan Evaluasi Hasil PBB di Desa-Desa Kecamatan Wotu



Pelayanan Publik di Kecamatan Wotu (Yang terdiri dari Pengurusan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran dan Akta Nikah)

### b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui Subkegiatan *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*, kecamatan mendorong keterlibatan aktif warga dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan rencana pembangunan, termasuk fasilitasi musrenbang desa dan pendampingan dalam merumuskan usulan prioritas.

Sementara itu, Subkegiatan *Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* lebih banyak diwujudkan melalui pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan PKK di desa-desa. Kegiatan mencakup koordinasi, monitoring pelaksanaan program PKK, fasilitasi gerakan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kapasitas kader agar kegiatan pemberdayaan berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, program ini berfokus pada peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hasil Pengukuran keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator kinerjanya yaitu : ***Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar*** ,dengan target kinerja sebesar 100% tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **75%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada

periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{75}{100} \right) \times 100\% \\ &= 75\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

**Tabel 3.8 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	75%	75%
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	75%	75%
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025



**Dokumentasi Kegiatan Program Pembeerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

---



Pendampingan Kegiatan Posyandu di Desa-Desa Kecamatan Wotu



Penilaian Desa Sehat Di Kantor Desa Cendana Hijau



Zoom Meeting Webinar Pekan Imunisasi Dunia



### c. Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum

Program Koordinasi dan Ketenteraman Ketertiban Umum dilaksanakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah kecamatan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai unsur terkait. Kecamatan berperan mengoordinasikan upaya pengamanan wilayah bersama Kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya, termasuk dalam penanganan kriminalitas, potensi gangguan ketertiban, serta pengamanan kegiatan masyarakat yang membutuhkan dukungan aparat.

Di sisi sosial kemasyarakatan, kecamatan turut memfasilitasi hubungan yang harmonis antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur kelembagaan desa guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial, seperti perselisihan warga dan sengketa lahan, serta menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat. Kecamatan juga menjalin sinergi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah, termasuk Satpol PP, terutama dalam kegiatan penertiban, pengamanan acara, dan penanganan situasi yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum.

Selain itu, program ini mencakup peran kecamatan dalam menangani kejadian bencana alam dan kebakaran. Kecamatan melakukan koordinasi cepat dengan BPBD, Damkar, dan instansi terkait untuk memastikan respons darurat berjalan efektif, termasuk pelaporan insiden, mobilisasi personel dan sumber daya, serta fasilitasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, program ini bertujuan mewujudkan wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai isu keamanan maupun kedaruratan melalui sinergi kuat antarinstansi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Sasaran dari Program Koordinasi dan Ketertiban Umum adalah Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja, yaitu *Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum yang Berjalan Sesuai Standar***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **50%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{50}{100} \right) \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

**Tabel 3.9 Pencapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	50%	50%
4.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	50%	50%
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Lap	2 Lap	50%



4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	2 Lap	50%
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100%	50%	50%
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Lap	2 Lap	50%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

## Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



Koordinasi/sinergitas dgn kepolisian dan TNI terkait pengamanan penjemputan jamaah haji kec. Wotu



Pemantauan siskamling di desa kanawatu



Koordinasi terkait permasalahan pemerintahan Desa Maramba



Mewakili pak camat dalam Musdes khusus KOPDES Desa Bawalipu



#### d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan untuk memastikan kelancaran fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan melalui koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimcam. Program ini mencakup kegiatan pemantauan dan pengendalian kondisi wilayah, fasilitasi penyelesaian berbagai isu pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta penguatan koordinasi antara kecamatan, Kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaannya, kecamatan berperan mengkoordinasikan pertemuan rutin Forkopimcam untuk membahas situasi keamanan, ketertiban, dan perkembangan wilayah, termasuk langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketenteraman masyarakat, dan ketahanan wilayah. Kegiatan ini juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di wilayah kecamatan, penanganan permasalahan lintas desa, serta monitoring terhadap implementasi program pemerintah di tingkat bawah.

Melalui sinergi yang kuat antara seluruh unsur Forkopimcam, program ini bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berjalan efektif, responsif, dan mampu menghadapi dinamika sosial di masyarakat, sehingga tercipta kondisi wilayah yang stabil, tertib, dan kondusif bagi pembangunan.

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **50%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{50}{100} \right) \times 100\% \\ &= 50\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

**Tabel 3.10 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentas capaian Kinerja Penyelenggaraa Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%	50%	50%
5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	50%	50%
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Lap	6 Lap	50%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025



## Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Monitoring dan Evaluasi APBDES Kecamatan Wotu

### e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Melalui program ini, kecamatan melakukan monitoring terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes, termasuk penelaahan dokumen, evaluasi kegiatan, serta memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Program ini juga mencakup pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan realisasi fisik dan keuangan. Dalam prosesnya, kecamatan memberikan pembinaan administratif, pendampingan

penyelesaian masalah, serta memastikan setiap kegiatan desa berjalan sesuai aturan.

Untuk memperkuat kualitas pembinaan, kecamatan melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, baik dalam hal regulasi, teknis pelaksanaan, maupun penyelesaian permasalahan yang memerlukan dukungan lintas sektor. Dengan demikian, program ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa secara konsisten dan terarah.

Sasaran dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian program baru mencapai 0% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Triwulan III dan IV. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang direncanakan, kemudian dinyatakan dalam persentase sesuai formulasi pengukuran kinerja yang berlaku

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja}(\%) &= \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{0}{100} \right) \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

**Tabel 3.11 Pencapaian Program Pembinaan dan Pengawasan  
Pemerintahan Desa**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	50%	25%
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	0%	0%
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Lap	0 Lap	0%
6.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17	0	0%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

**Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

RKPDES 2026 Kecamatan Wotu

**KESIMPULAN**

- Capaian kinerja pada sasaran **“Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Wotu”** sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **95,67%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{95,67}{100} \times 100\% \\
 &= 95,67\%
 \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** hingga **Triwulan II Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 55.646.400,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp.40.955.950,-** atau **73,60%** dari total anggaran yang dialokasikan.



### 3.2.2. Capaian Sasaran Strategis II

#### ***“Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu”***

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”, dan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Wotu yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) **indikator kinerja** yaitu **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

#### **1. Perbandingan Target dan Triwulan II Pada tahun 2025**

Formulasi indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian target adalah **“Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat”**. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **82 (kategori A)**. Namun, nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan realisasi akhir Tahun 2025 karena proses penilaian AKIP dilaksanakan pada awal tahun 2026. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan menggunakan **realisasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2025**.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada **Triwulan I Tahun 2025**, diperoleh nilai **61,10 (kategori BB)**. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.12 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	82	61,10	74,51%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya.**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	2022	73	63,24	86,63
		2023	77	64,20	83,37
		2024	81	75	92,59
		2025	82	61,10	74,51

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan **Tabel** di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada **Tahun 2022**, target yang ditetapkan sebesar **73**, dengan realisasi **63,24**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **86,63%**. Kinerja meningkat pada **Tahun 2023**, meskipun realisasi hanya **64,20** dari target **77**, capaian kinerja tercatat **83,37%**. Selanjutnya pada **Tahun 2024**, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana realisasi mencapai **75** dari target **81**, dengan capaian kinerja sebesar **92,59%**, menunjukkan perbaikan yang lebih optimal dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun pada **Tahun 2025**, meskipun target dinaikkan menjadi **82**, realisasi sementara baru mencapai **61,10**, sehingga capaian kinerja baru berada di angka **74,51%**.

Nilai capaian tahun 2025 tersebut masih bersifat sementara karena proses penilaian AKIP oleh Inspektorat belum dilakukan secara menyeluruh dan baru berdasarkan hasil **LHE Inspektorat Triwulan I Tahun 2025**. Namun demikian, tren peningkatan target setiap tahunnya menunjukkan adanya **komitmen Kecamatan Wotu untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja**, sehingga diharapkan nilai AKIP Tahun 2025 dapat meningkat setelah dilakukan penilaian secara penuh oleh Inspektorat pada tahun berikutnya.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA.

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Wotu 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	82	61,10	82

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja sampai dengan **Triwulan II Tahun 2025** menunjukkan nilai **61,10 (BB)**, yang berarti **belum mencapai target jangka menengah**. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat **ASN yang belum melakukan penginputan SKP, Dokumen Pelaporan Kinerja yang masih banyak butuh perbaikan**, serta rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Nilai tersebut masih merupakan hasil penilaian sementara (triwulanan) dan dapat mengalami perubahan setelah pelaksanaan penilaian AKIP tahunan oleh Tim Evaluator Inspektorat pada awal tahun berikutnya.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.**

##### **a. Faktor penyebab keberhasilan**

- 1) Komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung implementasi akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- 2) Tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Adanya upaya perbaikan melalui evaluasi internal, meskipun belum optimal, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas kinerja organisasi.

### b. Faktor Kegagalan / Penurunan Kinerja

- 1) **Aspek Perencanaan:** Dokumen perencanaan belum dilengkapi lampiran penjelasan indikator; Kepala Seksi dan staf belum mampu membedakan indikator dan rencana aksi; serta terdapat ASN yang belum membuat SKP.
- 2) **Aspek Pengukuran:** Belum ada evaluasi kinerja berkala oleh Camat; tidak terdapat bukti keterlibatan pimpinan dalam pengukuran kinerja; dan dokumentasi pencapaian kinerja belum berjalan.
- 3) **Aspek Pelaporan:** Laporan kinerja belum informatif dan tidak mencantumkan rekomendasi perbaikan.
- 4) **Aspek Evaluasi:** Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan sepenuhnya dan tindak lanjut rekomendasi belum dilaksanakan secara menyeluruh

### c. Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

- 1) **Peningkatan Kapasitas ASN:** Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar seluruh pegawai memahami indikator, target, dan rencana aksi.
- 2) **Penguatan Evaluasi Internal:** Melaksanakan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 3) **Peningkatan Keterlibatan Pimpinan:** Menetapkan jadwal rapat kinerja secara berkala dengan notulen dan bukti dukung untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan efektif.
- 4) **Perbaikan Dokumen Pelaporan:** Menyusun laporan yang lebih informatif, memuat analisis capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan secara lengkap serta mempublikasikannya melalui Website PPID.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 (Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu) terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan, dan 23 Subkegiatan. Dengan alokasi anggaran sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp. 1.838.422.444 dengan realisasi sebesar Rp 1.310.562.688 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 71,28%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja triwulan berikutnya

**Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN WOTU</b>	Nilai AKIP Kecamatan Wotu	82	61,1	74,51%	Rp. 1.838.422.444	Rp.1.310.562.688	71,28%

Sumber : Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, indikator **Nilai AKIP Kecamatan Wotu** menunjukkan tingkat capaian sebesar **74,51%**, dengan **realisasi anggaran sebesar 71,28%** dari total alokasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya **korelasi yang cukup seimbang antara tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran**, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan **cukup efisien**.

Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dari selisih antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Berdasarkan data yang ada, diperoleh **tingkat efisiensi biaya sebesar 28,72%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Kecamatan Wotu pada Triwulan II Tahun 2025 tergolong efisien, karena meskipun realisasi anggaran baru mencapai 71,28%, namun capaian kinerja sudah mendekati target, yaitu sebesar 74,51%. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Wotu.

**6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam Pencapaian sasaran Strategis II (Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu) didukung oleh satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. **Indikator** Program ini adalah **Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan Formulasi jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.**

**Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemertihan Daerah  
Kabupaten/Kota**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	50%	48,975%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	50%	50%	35%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok	50%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	0	0	0%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD		Jumlah dokumen DKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok	50%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10 Lap	4 Lap	4 Lap	40%

1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	<b>19 Org/Bln</b>	19 Org/Bln	19 Org/Bln	100%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (Laporan)	<b>12 Lap</b>	6 Lap	6 Lap	50%
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	terlaksananya administrasi BMD yang diadministrasikan tepat waktu	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	<b>4 Lap</b>	2 Lap	2 Lap	50%
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	<b>12 Lap</b>	6 Lap	6 Lap	50%



1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	2 Org	1 Org	1 Org	50%
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	70%	70%	64,34%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	9 Paket	6 Paket	6 Paket	66,66%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67%
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	42 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	52,38%
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	12 Lap	6 Lap	6 Lap	50%
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12 Lap	6 Lap	6 Lap	50%
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	tersedianya BMD perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	0%	0%	0%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	2 Unit	0	0	0

1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	<b>12 Lap</b>	6 Lap	6 Lap	50%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	<b>12 Lap</b>	6 Lap	6 Lap	50%
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	<b>2 Lap</b>	2 Lap	2 Lap	50%
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	<b>12 Lap</b>	6 Lap	6 Lap	50%
1.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>67,46%</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya (Unit)	<b>6 Unit</b>	4	2 Unit	52.38%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	<b>21 Unit</b>	11 Unit	11 unit	50
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	<b>2 Unit</b>	2 Unit	2 unit	100%

Sumber: Kecamatan Wotu, data diolah tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Triwulan II Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **48,97%** dan penyerapan anggaran mencapai **48,75%**. Sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai rencana, termasuk beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya berada pada kisaran **50%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan target Triwulan II dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya untuk mencapai target tahunan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dengan capaian di bawah target, seperti **penyediaan peralatan dan mesin** yang realisasinya masih 0% karena proses pengadaan masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada **Triwulan III Tahun 2025**. Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja, Kecamatan Wotu akan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi antar bidang, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi agar seluruh sasaran program dapat tercapai secara maksimal pada akhir tahun anggaran

### **KESIMPULAN**

- Capaian kinerja pada sasaran “**Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Wotu**” sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar 74,51%, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ &= \frac{74,51}{100} \times 100 \\ &= 74,51\% \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Wotu didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Wotu** hingga **Triwulan II Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 1.970.662.344,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp. 1.396.824.127,-** atau **70,88%** dari total anggaran yang dialokasikan.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Wotu memperoleh alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 2.949.577.075 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.932.577.075 dan belanja modal sebesar Rp. 17.000.000. Seluruh alokasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 program, 14 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.

Berdasarkan realisasi anggaran Kecamatan Wotu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, serapan anggaran mencapai **48,75%** dari total pagu sebesar Rp 2.949.577.075. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan percepatan pada triwulan berikutnya.

Sub kegiatan dengan capaian tertinggi adalah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, yang realisasinya telah melampaui **90%**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut terencana dengan baik dan dapat dilaksanakan tepat waktu tanpa hambatan administrasi.

Sementara itu, capaian terendah terdapat pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang masih 0%, karena kegiatan baru dijadwalkan pada Triwulan IV dan menunggu PTO (Petunjuk Operasioanl) dari dinas terkait dan masih menunggu Pengajuan Monev dari Desa Desa di Kecamatan Wotu. Beberapa sub kegiatan lainnya juga masih rendah serapannya karena menunggu proses GU bendahara yang belum teradministrasi sebagai realisasi.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran hingga Triwulan III masih berjalan sesuai perencanaan. Namun demikian, diperlukan percepatan penyelesaian kegiatan dan administrasi keuangan pada Triwulan IV agar target serapan anggaran akhir tahun dapat tercapai secara optimal..

Adapun target dan realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2025**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target s.d TW II		Realisasi Anggaran S.d		Selisih	Total Sisa Anggaran		Persentase Capaian Anggaran sampai 30 Juni Tahun 2025
			TA.2025 (Berdasarkan Anggaran KAS)		30 Juni 2025					
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
				Rp	%	Rp		Rp	%	
	<b>KECAMATAN WOTU</b>	<b>2.949.577.075</b>	<b>2.041.202.244</b>	<b>1.437.780.077</b>	<b>49</b>	<b>603.422.167</b>		<b>1.511.796.998</b>	<b>51,25</b>	<b>48,75</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.841.842.675</b>	<b>1.970.662.344</b>	<b>1.396.824.127</b>	<b>71</b>	<b>573.838.217</b>		<b>1.445.018.548</b>	<b>50,85</b>	<b>49,15</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>30.170.500</b>	<b>20.841.500</b>	<b>9.080.000</b>	<b>28,72</b>	<b>11.761.500</b>	<b>0,49</b>	<b>21.090.500</b>	<b>69,90</b>	<b>30,10</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.025.000	9.075.000	6.310.000	69,53	2.765.000	0,49	7.715.000	55,01	44,99
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.554.950	524.950	-	0,00	524.950	0,30	3.554.950	100,00	0,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.724.850	2.724.850	650.000	23,85	2.074.850	0,45	2.074.850	76,15	23,85
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.865.700	8.516.700	2.120.000	21,49	6.396.700	0,00	7.745.700	78,51	21,49
<b>1.2</b>	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b>2.304.780.893</b>	<b>1.612.560.994</b>	<b>1.128.818.773</b>	<b>70,00</b>	<b>483.742.221</b>	<b>0,24</b>	<b>1.175.962.120</b>	<b>51,02</b>	<b>48,98</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.281.560.893	1.599.610.994	1.119.428.773	69,98	480.182.221	0,21	1.162.132.120	50,94	49,06
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	23.220.000	12.950.000	9.390.000	72,51	3.560.000	0,49	13.830.000	59,56	40,44

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.290.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>66,15</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0,49</b>	<b>6.460.000</b>	<b>62,78</b>	<b>37,22</b>
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.290.000	5.790.000	3.830.000	<b>66,15</b>	1.960.000	<b>0,40</b>	6.460.000	62,78	37,22
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>18.739.850</b>	<b>14.349.850</b>	<b>2.910.000</b>	<b>20,28</b>	<b>11.439.850</b>	<b>0,37</b>	<b>15.829.850</b>	<b>84,47</b>	<b>15,53</b>
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.071.850	2.681.850	1.130.000	<b>42,14</b>	1.551.850	<b>0,37</b>	1.941.850	63,21	36,79
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15.668.000	11.668.000	1.780.000	<b>15,26</b>	9.888.000	<b>0,16</b>	13.888.000	88,64	11,36
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>176.288.800</b>	<b>138.785.000</b>	<b>131.349.000</b>	<b>94,64</b>	<b>7.436.000</b>	<b>0,37</b>	<b>44.939.800</b>	<b>25,49</b>	<b>74,51</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.125.000	2.125.000	720.000	<b>33,88</b>	1.405.000	<b>0,11</b>	1.405.000	66,12	33,88
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.525.000	4.560.000	4.030.000	<b>88,38</b>	530.000	<b>0,75</b>	2.495.000	38,24	61,76
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.599.800	5.000.000	7.740.000	<b>154,80</b>	(2.740.000)	<b>0,34</b>	1.859.800	19,37	80,63
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	2.100.000	1.800.000	<b>85,71</b>	300.000	<b>0,62</b>	2.400.000	57,14	42,86
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.500.000	95.000.000	89.775.000	<b>94,50</b>	5.225.000	<b>0,81</b>	22.725.000	20,20	79,80
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.339.000	30.000.000	27.284.000	<b>90,95</b>	2.716.000	<b>0,43</b>	14.055.000	34,00	66,00
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0,80</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	-	<b>0,00</b>	17.000.000	<b>0,66</b>	17.000.000	100,00	0,00
1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>247.407.632</b>	<b>130.635.000</b>	<b>102.448.004</b>	<b>78,42</b>	<b>28.186.996</b>	<b>0,00</b>	<b>144.959.628</b>		<b>41,41</b>

1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.673.750	7.130.000	4.938.500	69,26	2.191.500	0,00	6.735.250	57,70	42,30
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.748.882	22.000.000	14.484.504	65,84	7.515.496	0,41	23.264.378	61,63	38,37
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.025.000	5.025.000	5.025.000	100,00	-	0,42	-	0,00	100,00
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.960.000	96.480.000	78.000.000	80,85	18.480.000	0,38	114.960.000	59,58	40,42
1.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.165.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>18.388.350</b>	<b>59,90</b>	<b>12.311.650</b>	<b>1,00</b>	<b>18.776.650</b>	<b>50,52</b>	<b>49,48</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.995.000	13.950.000	5.888.350	42,21	8.061.650	0,40	13.106.650	69,00	31,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000	6.750.000	2.500.000	37,04	4.250.000	0,49	5.670.000	69,40	30,60
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	-	0,31	-	0,00	100,00
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.019.500</b>	<b>4.320.000</b>	<b>930.000</b>	<b>21,53</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0,31</b>	<b>5.089.500</b>	<b>84,55</b>	<b>15,45</b>
2.1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>6.019.500</b>	<b>4.320.000</b>	<b>930.000</b>	<b>21,53</b>	<b>3.390.000</b>	<b>1,00</b>	<b>5.089.500</b>	<b>84,55</b>	<b>15,45</b>
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.019.500	4.320.000	930.000	21,53	3.390.000	0,15	5.089.500	84,55	15,45
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>62.231.750</b>	<b>40.231.750</b>	<b>24.157.950</b>	<b>60,05</b>	<b>16.073.800</b>	<b>0,15</b>	<b>38.073.800</b>	<b>61,18</b>	<b>38,82</b>
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>62.231.750</b>	<b>40.231.750</b>	<b>24.157.950</b>	<b>70,83</b>	<b>16.073.800</b>	<b>0,15</b>	<b>38.073.800</b>	<b>61,18</b>	<b>38,82</b>

3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.512.950	11.512.950	11.057.950	96,05	455.000	0,39	455.000	3,95	96,05
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.718.800	28.718.800	13.100.000	45,61	15.618.800	0,39	37.618.800	74,17	25,83
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.175.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>3.668.000</b>	<b>49,74</b>	<b>3.707.000</b>	<b>0,96</b>	<b>5.507.000</b>	<b>60,02</b>	<b>39,98</b>
4.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>39,63</b>	<b>4.410.000</b>	<b>0,26</b>	<b>4.077.000</b>	<b>69,10</b>	<b>30,90</b>
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.425.000	2.625.000	1.117.000	42,55	1.508.000	0,40	2.308.000	100,00	32,61
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.475.000	1.975.000	706.000	35,75	1.269.000	<b>0,31</b>	1.769.000	100,00	28,53
4.2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>3.275.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>66,49</b>	<b>930.000</b>	<b>0,33</b>	<b>1.430.000</b>	<b>43,66</b>	<b>56,34</b>
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.275.000	2.775.000	1.845.000	66,49	(520.200)	0,29	1.430.000	74,29	56,34
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>25.248.500</b>	<b>14.803.500</b>	<b>12.200.000</b>	<b>82,41</b>	<b>2.603.500</b>	<b>0,56</b>	<b>13.048.500</b>	<b>51,68</b>	<b>48,32</b>



5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>25.248.500</b>	<b>14.803.500</b>	<b>12.200.000</b>	<b>82,41</b>	<b>2.603.500</b>	<b>0,56</b>	<b>13.048.500</b>	<b>51,68</b>	<b>48,32</b>
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.248.500	14.803.500	12.200.000	82,41	2.603.500	0,48	13.048.500	51,68	48,32
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5.059.650</b>	<b>3.809.650</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.650</b>	<b>0,48</b>	<b>5.059.650</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>5.059.650</b>	<b>3.809.650</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.650</b>	<b>0,48</b>	<b>5.059.650</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.134.850	2.484.850	-	0,00	2.484.850	0,00	3.134.850	100,00	0,00
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.924.800	1.324.800	-	0,00	1.324.800	0,00	1.924.800	100,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.949.577.075</b>	<b>2.041.202.244</b>	<b>1.437.780.077</b>	<b>70,44</b>	<b>603.422.167</b>	<b>25,96</b>	<b>1.511.796.998</b>	<b>51,25</b>	<b>48,75</b>

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

Tabel 3.18 Permasalahan Dan Solusi Terkait Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian		
		Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
	<b>KECAMATAN WOTU</b>			
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1.1	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen pada TW I s/d TW II	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW II mencapai 69,53 % telah tercapai sesuai Target	Pada Sub Kegiatan ini realisasi Keuangan telah mencapai diatas 50 % dikarenakan adanya ifisinsi sehingga pada perubahan anggaran Kas tidak Berkurang di TW I dan pengurangan anggaran Kas pada TW
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja belum terlihat atau belum terealisasi	Pada Sub Kegiatan ini Realisasi Keuangannya masih 0% dikarenakan pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada TW III dan IV	Untuk Sub Kegiatan ini telah dianggarkan seperti tahun-tahun sebelumnya tapi pada tahun ini kegiatan yang berhubungan pada sub Kegiatan ini sangat minim jadi pada Sub Kegiatan sudah berjalan normal dikarenakan kinerja pada sub Kegiatan ini tetap tercapai
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen pada TW I s/d TW II	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW II mencapai 23,85 % dan adapun anggaran Kas Tdk berkurang Pada TW I dan TW II dan hanya pada TW III dan TW IV Karena adanya Efisinsi	Untuk Sub Kegiatan ini realisasi Kinerja dan Keunagnnya pada TW I dan TW IV mengingat pelksanakan kegitannya di anggrakan pada TW tersebut

1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Pada TW II di Sub Kegiatan ini terelalisasi sebanyak 2 Dokumen	Pada Sub Kegiatan ini Realisasi Keuangan barumencapai 21,49% dan adapun belanja sudah terealisasi tapi belum di Gukan	Pada Sub Kegiatan ini Kegiatan yang sudah di SPJ Kan akan di GU kan di bulan berikutnya
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator kinerja pada Sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjanganya terbayarkan. Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada Triwulan II 19 orang/Bulan tererealisasi sebanyak 19 orang/Bulan	Target keuangandan tareget kinerja pada sub kegiatan ini mencapai target berdasarkan anggaran pada TW II sebesar Rp. 1.597.810.974,- realisasi Rp. 935.206.886,- atau 59 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggaran KAS. Pada Triwulan II
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator kinerja pada Sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada Triwulan II adalah 6 Laporan tererealisasi sebanyak 6 Laporan. .	Target keuangan pada sub kegiatan ini mencapai target berdasarkan anggaran pada TW II sebesar Rp. 13.329.800,- realisasi Rp. 7.930.000,- atau 59 %.	Agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu Target kinerjanya tercapai	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran pada TW II sebesar Rp. 6.029.500,- realisasi Rp. 2.940.000,- atau 49 %.	Realisasi kinerja dan keuangan pada sub kegiatan ini tercapai

		sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja Triwulan II adalah 2 Laporan terrealisasi sebanyak 2 Laporan. .		
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Target Kinerja sudah Tercapai di TW II	Pada Sub Kegiatan ini realisasi Keuangan telah mencapai 42,14% dan sisa dari anggaran pada kegiatan masih menunggu jadwal kegiatan berikutnya	Adapun Sisa dari anggaran pada sub kegiatan ini akan digunakan pada berikutnya mengingat adanya dampak efisinsi maka kegiatan pada sub kregiatan telah dimaksimalkan
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pada Sub Kegiatan Ini target kinerja telah terealisasi sebanyak 1 orang	Pada Sub Kegiatan Ini realisasi Keuangan 15,26% dan adapun kegiatan Bimtek yang telah dilaksanagn hanya menggunakan anggaran pada Perjalanan Dinas dikarenakan Biaya Kontribusi du bebankan pada BKPSDM	Adapun Target Kinerja dan Keuangan pada Sub Kegiatan ini masih menunggu Jadwal Berikutnya
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 9 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 6 paket	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW I-II sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi Rp. 720.000,- atau 64 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS, salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini karena adanya beberapa kegiatan yang menggunakan komponen instalasi listrik
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket).	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen

		Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 6 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 4 paket	4.560.000,- realisasi Rp. 4.130.000,- atau 90 %.	DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS, akan mengefesiensikan anggaran tahun berikutnya agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai target yg ditetapkan. salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini karena adanya kebutuhan logistik kantor sangat vital dalam menunjang kebersihan lingkungan kantor Camat Wotu.
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)). Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 3 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 2 paket	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 4.790.000,- atau 96 %..	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen) . Target Sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja 24 Dokumen dan realisasi kerja sebanyak 24 Dokumen.	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 2.100.000,- realisasi Rp. 1.500.000,- atau 95,83%.	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan

		target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 6 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan	95.000.000,- realisasi Rp. 89.775.000,- atau 94 %.	anggran KAS, salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rapat dan makanan dan minuman tamu
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 6 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp.50.000.000,- realisasi Rp. 27.279.000,- atau 54 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS, salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rapat termasuk biaya operasional,fasilitasi dan transfortasi
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan (unit) . Target Sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 2 Unit. dan realisasi kinerja 0 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 17.000.000,- realisasi Rp.0,- atau 0 %.	Belanja modal pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara melalui proses e-katalog sehingga sampai pada Triwulan II belum ada petunjuk dari ULP terkait dengan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW IV sebesar Rp.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen

		kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 6 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan	7.130.000,- realisasi Rp. 4.938.500,- atau 69 %.	DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS pada TW II
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 6 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 22.000.000,- realisasi Rp.14.484.504,- atau 30 %.	Target kinerja dan keuangan sub kegiatan ini tdk tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS pada TW II salah faktor tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan adalah realisasi sesuai dengan kebutuhan atau pemakaian daya listrik yang digunakan.Belanja pembayaran listrik sesuai dengan jumlah pemakaian listrik setiap bualhnya
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 2 Laporan dan realisasi kerja sebanyak 2 Laporan.	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 5.025.000,- realisasi Rp.5.025.000,- atau 100 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggran KAS pada TW II
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 6	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 96.480.000,- realisasi Rp. 48.880.000,- atau 51 %.	Capaian target keuangan kurang dari pada target yang telah ditetapkan pada anggaran KAS pada TW II karena adanya upah jasa berakhir masa jabatannya sebanyak 2 Orang dan pembayaran honorarium upaj jasa untuk bulan juni sebesar Rp.28.500.000 dibayarkan pada bulan juli 2025



		Laporan dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan.		
1.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW IV 5 Unit dan realisasi kerja sebanyak 5 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW IV sebesar Rp. 13.950.000,- realisasi Rp. 5.888.350,- atau 42 %.	Akan mengefisienkan anggaran tahun berikutnya
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dengan target kinerja pada TW II 21 Unit dan realisasi kerja sebanyak 11 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 18.895.000,- realisasi Rp.2.500.000 -- atau 13 %.	Target keuangan sub kegiatan ini tdk tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggaran KAS pada TW II salah faktor tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan adalah realisasi sesuai dengan kebutuhan atau pemakaian daya listrik yang digunakan. Belanja pembayaran listrik sesuai dengan jumlah pemakaian listrik setiap bulannya
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi Rp.10.000.000 - atau 100 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Wotu dan anggaran KAS pada TW II

		Wotu dengan target kinerja pada TW IV 3 Unit dan realisasi kerja sebanyak 3 Unit		
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
2.1	<b><i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i></b>			
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pada subKegiatan ini Traget Kinerja 12 Laporan telah tercapai 100%	Realisasi Keuangan Pada Sub kegiatan ini Sebesar 15% Dan Semua Belanja Pada Sub Kegiatan di Mana Anggaran Sebagian Telah Berkurang Setelah Perubahan.	Untuk Anggaran Sub Kegiatan Ini Akan di Optimalkan di TW Berikutnya,Mengingat Terkait Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Telah Berkurang dari Yang di Anggarkan pada Tahun Berikutnya.
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pada Sub kegiatan ini target Kinerja 1(satu) Laporan dan tercapai 100 % pada TW I	Pada Sub kegiatan Musrembang realisasi keuangan mencapai 100% pada TW I	Pada Sub Kegiatan ini sudah terlaksana dikarenakan kinerja pada sub kegiatan ini tercapai
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pada Sub kegiatan ini target Kinerja 12 Laporan dan tercapai dengan 6 laporan	Pada Sub kegiatan ini target keuangan mencapai 37,65 %, terkait realisasi keuangan kurang pada tiwulan I	Kegiatan mencapai target, masih ada SPJ kegiatan yang belum di GU kan, sehingga realisasi keuangan belum mencapai 50 % di tiwulan II
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
4.1	<b><i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum</i></b>			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Pada Sub Kegiatan Ini Target Kinerja 4 Laporan dengan Capaian	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW II telah mencapai 32,61% adapun sisa atau selisih aggaran pada TW II yaitu	Pada Sub Kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada Anggaran Perubahan, terkait perjalanan dinas

	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%, dan telah tercapai 2 Laporan dengan capaian kinerja 50%	sebesar 67,39% pada belanja perjalan dinas dan belanja makan minum rapat, pada kenyataannya pada Tahun ini kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini anggaran telah berkurang setelah perubahan	untuk kegiatan ini telah berkurang dari yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dan sisa SPJ yang belum di pertanggungjawabkan akan di proses dan menunggu untuk di GU kan pada GU berikutnya
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pada Sub Kegiatan Ini Target Kinerja 4 Laporan dengan Capaian 100%, telah tercapai 2 Laporan dengan capaian kinerja 50%	Realisasi keuangan pada Sub Kegiatan ini terdapat Sisa atau Selisih sebesar 71,47% pada belanja perjalan dinas dan belanja makan minum rapat dimana pada Sub Kegiatan ini telah tercapai realisasi keuangan sebesar 28,53% dan pada kenyataannya pada Tahun ini kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini anggaran telah berkurang setelah perubahan	Pada Sub Kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada Anggaran Perubahan, terkait perjalanan dinas untuk kegiatan ini telah berkurang dari yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dan sisa SPJ yang belum di pertanggungjawabkan akan di proses dan menunggu untuk di GU kan pada GU berikutnya
4.2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pada Sub Kegiatan Ini Target Kinerja 4 Laporan dengan Capaian 100%, telah tercapai 2 Laporan dengan capaian kinerja 50%	Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan ini mencapai 56,34% dan masih terdapat sisa sebesar 43,66% pada belanja perjalan dinas dan belanja makan minum rapat dan pada kenyataannya pada Tahun ini kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini anggaran telah berkurang setelah perubahan	Pada Sub Kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada Anggaran Perubahan, terkait perjalanan dinas untuk kegiatan ini telah berkurang dari yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dan sisa SPJ yang belum di pertanggungjawabkan akan di proses dan menunggu untuk di GU kan pada GU berikutnya
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			

5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pada Sub Kegiatan ini pelaksanaan tidak tepat waktu pelaksanaannya dikarenakan adanya kegiatan yang selalu bersamaan	Proses pelaksanaan pencairan keuangan/anggaran tidak tepat waktu	Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
6.1	<b><i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>			
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pada Sub Kegiatan ini untuk dilaksanakan pada TW II dan TW IV kegiatan belum bisa dilaksanakan pada awal tahun sebelum desa menyelesaikan Administra penyusunan kegiatan di desa begitu pada akhir tahun kegiatan di desa selalu terlambat kegiatannya	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan di desa sehingga kegiatan ini terlambat terialisasi	Pelaksanaan Penyusunan dan penetapan APDES di Desa harus dilakukan pada Akhir Tahun berjalan dan awal tahun berikutnya anggaran di desa bisa lebih cepat diawal tahun.begitupun pelaksanaan kegiatan di desa
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pada Sub kegiatan ini belum ada kegiatan terlaksana di Desa	Pada Sub kegiatan ini pada TW I realisasi keuangan belum berjalan	Kegiatan Monitoring belum terlaksana masih menunggu kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan BKK di Desa

Sumber: Kecamatan Wotu, Data diolah tahun 2025

### 3.4. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi

Budaya kerja merupakan cerminan nilai, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang baik akan membentuk lingkungan kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, budaya kerja yang positif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Pencapaian kinerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja organisasi. Kinerja yang tercapai sesuai target akan menumbuhkan semangat kerja, motivasi, serta rasa memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi. Sebaliknya, capaian kinerja yang belum optimal dapat menjadi refleksi bagi organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap disiplin, pola kerja, dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, konsistensi pencapaian kinerja menjadi faktor penting dalam menjaga budaya kerja yang produktif dan adaptif.

Dalam upaya memperkuat budaya kerja dan meningkatkan pencapaian kinerja, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menginternalisasi nilai-nilai dasar **BerAKHLAK** sebagai panduan perilaku kerja, yaitu: **Berorientasi Pelayanan** (memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif), **Akuntabel** (bertanggung jawab dan transparan), **Kompeten** (selalu meningkatkan kapasitas diri), **Harmonis** (membangun kerja sama dan menghargai perbedaan), **Loyal** (setia pada bangsa dan nilai organisasi), **Adaptif** (terbuka terhadap perubahan dan inovasi), serta **Kolaboratif** (bekerja sama untuk hasil terbaik).

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten akan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

## BAB IV

### PENUTUP

Kecamatan Wotu telah menetapkan dua sasaran strategis yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Wotu 2021–2026. Penetapan sasaran tersebut bertujuan untuk menjamin keselarasan antara tujuan organisasi dengan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kecamatan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan masih dalam proses pelaksanaan sehingga evaluasi kinerja belum dapat dilakukan sepenuhnya. Indikator sasaran pertama, **Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 81,32 dari target 85**, menunjukkan tingkat kepuasan yang sudah baik namun belum memenuhi target. **Indikator sasaran kedua, Nilai AKIP, masih mengacu pada penilaian sementara Triwulan I sebesar 61,10** karena penilaian resmi Tahun 2025 baru dilakukan pada Triwulan I 2026. Sedangkan Realisasi anggaran pada Triwulan II adalah sebesar **48,75%**.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Wotu pada periode Laporan ini merupakan hasil dari komitmen, dedikasi, dan kerja sama seluruh jajaran aparatur dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan acuan dalam peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Wotu pada periode selanjutnya.

Demikian **Laporan Kinerja Kecamatan Wotu Tahun Anggaran 2025 Triwulan II** disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi sarana perbaikan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kecamatan Wotu.

Wotu, 07 Juli 2025  
Camat Wotu,



**HAJIS DAWI, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19700908 200312 1 004